

# Analisis Wacana Kritis Surat Edaran Gubernur NTB tentang Pencegahan Covid-19: Aplikasi Model Fairclough

Sukarismanti<sup>1</sup>

Rustono<sup>2</sup>

Hari Bakti Mardikantoro<sup>3</sup>

Samsudin<sup>4</sup>

<sup>14</sup>Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

<sup>23</sup>Universitas Negeri Semarang, Indonesia

[1sukarismanti@uts.ac.id](mailto:sukarismanti@uts.ac.id),

[2rus\\_tono58@yahoo.co.id](mailto:rus_tono58@yahoo.co.id),

[3haribaktim@gmail.com](mailto:haribaktim@gmail.com)

[4samsudin@uts.ac.id](mailto:samsudin@uts.ac.id)

## Abstrak

Penelitian bertujuan untuk menganalisis konstruksi Surat Edaran Gubernur NTB tentang pencegahan penularan COVID-19 selama masa libur panjang dan cuti Maulid Nabi Muhammad SAW pada tahun 2020 dengan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis. Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan jenis datanya adalah surat edaran yang terbitkan oleh pemerintah NTB pada tahun 2020 dan di download di Internet. Teknik analisis data penelitian ini mengadopsi analisis wacana kritis model Fairclough. Fokus utama penelitian ini adalah pada aspek mikrostruktural, makrostruktural, dan analisis wacana kritis. Hasil analisis mengungkap bahwa pada dimensi mikrostruktural, analisis kohesi, yang mencakup referen, substitusi, dan konjungsi, membeberkan cara penggunaan bahasa untuk membangun kohesi dan koherensi dalam suatu teks. Pada level makrostruktural, penelitian ini mengeksplorasi hubungan antar institusi dan praktik sosial budaya, mengungkapkan dinamika kebijakan dan koordinasi yang terlibat dalam menghadapi krisis. Sementara analisis wacana kritis pada tingkat sosial dan politik menyoroti peran bahasa dalam membentuk pandangan publik dan mempertahankan struktur kekuasaan.

**Kata Kunci:** *Analisis Wacana Kritis, Media, Fairclough*

## Pendahuluan

Media, dengan kekuatannya yang luar biasa, tidak hanya sekedar menyampaikan informasi dan pesan kepada masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai pilar utama dalam membentuk opini, nilai-nilai, dan persepsi kolektif. Dalam perannya yang sangat sentral, media memiliki kemampuan untuk memengaruhi pikiran individu dan bahkan menyebarkan ideologi tertentu yang dapat membentuk landasan budaya dan politik suatu masyarakat. Lebih dari sekedar penyalur berita, media dapat menjadi agen yang mendukung atau bahkan menciptakan kekuasaan dengan memainkan peran penting dalam membentuk pandangan publik terhadap kebijakan, pemimpin, dan isu-isu krusial. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap peran media dalam menyusun opini publik menjadi krusial untuk menjaga kesehatan demokrasi dan memastikan bahwa informasi yang disajikan bersifat seimbang serta bermakna bagi masyarakat.

Dalam konteks ini, media sebagai salah satu bentuk wacana menjadi fokus perhatian analisis linguistik. Seperti yang dijelaskan oleh (Baryadi, 2002), istilah wacana didefinisikan dalam kerangka linguistik. Dalam perspektif ini, pendekatan analisis wacana kritis dianggap sebagai metode yang efektif untuk memahami pembangunan

makna dalam media. Pendekatan ini tidak hanya memeriksa unsur-unsur linguistik dalam teks media, tetapi juga melibatkan pemahaman mendalam tentang dinamika kekuasaan, ideologi, dan struktur sosial yang terkandung dalam wacana tersebut (Brown & Yule, 1983; Rahimi & Riasati, 2011). Dengan demikian, analisis wacana kritis mampu mengungkap dimensi yang lebih kompleks dan kontekstual dalam penelitian terhadap wacana media.

Selain itu, wacana media yang mencerminkan interaksi sosial memberikan kemudahan pemahaman bagi pembaca (Humaira, 2018; Kridalaksana, 2008; Sumarlam, 2003). Fokus utama wacana ini lebih condong pada tulisan dengan struktur berita, terutama yang membahas peristiwa melalui media surat kabar (Badara, 2012; Coulthard, 1985). Dengan demikian, keseluruhan pemahaman terhadap peran media dan analisis wacana kritis menjadi esensial dalam menjaga kesehatan demokrasi dan memastikan bahwa informasi yang disajikan memiliki keseimbangan dan makna yang relevan bagi masyarakat.

Wacana yang menjadi fokus kajian ini membahas surat edaran gubernur NTB yang dikaitkan dengan langkah-langkah pencegahan penularan COVID-19 selama libur panjang dan cuti Maulid Nabi Muhammad SAW pada tahun 2020. Dalam konteks tersebut, analisis wacana kritis menjadi relevan untuk memahami bagaimana media mengonstruksi makna terkait dengan kebijakan pencegahan pandemi yang diumumkan oleh pemerintah daerah. Kajian ini tidak hanya akan mengidentifikasi unsur-unsur linguistik yang digunakan dalam surat edaran, tetapi juga merinci bagaimana kekuasaan, ideologi, dan struktur sosial tercermin dan dibangun melalui wacana tersebut. Analisis ini akan membantu mengungkap cara media menyampaikan informasi mengenai kebijakan kesehatan masyarakat, memahami bagaimana pesan tersebut dapat memengaruhi opini, nilai-nilai, dan persepsi masyarakat, serta mengeksplorasi peran media dalam membentuk pandangan publik terhadap tindakan pemerintah dalam menghadapi situasi krisis seperti pandemi COVID-19. Dengan demikian, kajian terhadap wacana surat edaran gubernur NTB menjadi penting dalam mendukung pemahaman lebih mendalam terhadap peran media dalam konteks pencegahan dan penanganan pandemi.

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan model analisis wacana kritis (AWK) Fairclough (1995), yang menganggap wacana sebagai suatu bentuk teks. Oleh karena itu, fokus penelitian ini pada analisis wacana sesuai dengan perspektif umum analisis wacana yang dijelaskan dalam model Norman Fairclough. Sementara data penelitian ini merupakan surat edaran gubernur NTB tentang pencegahan covid-19 yang diterbitkan pada 23 Oktober 2020 dan di download pada link <https://dompukab.go.id/surat-edaran-gubernur-ntb-pencegahan-penularan-covid-19-dimasa-cuti-bersama-maulid-nabi-muhammad-saw.html>. Langkah-langkah analisis dalam penelitian ini melibatkan beberapa langkah, seperti membaca teks, identifikasi, kategorisasi, analisis, dan membuat laporan penelitian. Selain proses-proses tersebut, peneliti juga menggunakan dua teori utama sebagai instrumen analisis, yakni teori analisis wacana model Fairclough (1995) untuk mendeskripsikan aspek macrostruktural dan analisis wacana kritis, aspek mikrostruktural yang terfokus pada kohesi teks menggunakan teori yang dikembangkan oleh Halliday dan Hasan (1976).

## Hasil

### Mikrostruktural

Mikrostruktural merupakan salah satu aspek penting dalam pendekatan Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough. Dalam tahap ini, fokus utamanya adalah pada tata bahasa (gramatikal), kohesi, koherensi, semantik, pragmatik, semiotik, dan elemen-elemen lainnya yang berhubungan dengan bahasa dan struktur teks (Fairclough, 1995). Dalam konteks penelitian ini, penulis melakukan analisis mendalam terhadap isi teks dengan fokus pada aspek kohesi.

Dalam upaya untuk menganalisis kohesi dalam konteks bahasa, penelitian ini memanfaatkan kerangka kerja yang dikemukakan oleh Halliday dan Hasan (1976). Dalam kerangka kerja ini, terdapat beberapa jenis kohesi yang di analisis, yang meliputi referen, substitusi, elipsis, dan konjungsi, serta kohesi leksikal. Namun, Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa dalam surat edaran tersebut terdapat tiga jenis kohesi, yaitu referen, substitusi, dan konjungsi sebagaimana yang digambarkan dibawah ini:

### Referen

Referen adalah alat linguistik yang memungkinkan pembaca atau pendengar untuk melacak hubungan antara bagian-bagian berbeda dalam suatu teks. Dalam kasus tersebut, penggunaan kata "**hal**" dalam kalimat "*....tanggal 21 oktober 2020 hal libur panjang dan cuti bersama maulid Nabi Muhammad SAW*" menjadi referen yang menghubungkan kalimat dengan konteks sebelumnya. Dengan adanya referen, pembaca dapat lebih mudah memahami bahwa kata "**hal**" tersebut merujuk pada pembahasan sebelumnya tentang libur panjang dan cuti bersama Maulid Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, penggunaan referen seperti ini memperkuat koherensi dan kelancaran pembacaan teks, memungkinkan informasi untuk tersusun secara teratur dan mudah dipahami.

### Subtitusi

Substitusi adalah penggunaan kata atau frasa pengganti untuk menghindari pengulangan kata atau frasa yang sama. Dalam teks ini, contoh substitusi adalah penggunaan "**ASN**" pada kalimat "*Pegawai ASN dan keluarganya tidak melakukan kegiatan bepergian keluar daerah*" merupakan singkatan dari frasa "pegawai negeri sipil se NTB" seperti yang terdapat dalam kalimat "*diminta kepada seluruh pegawai negeri sipil se NTB agar....*" Tujuannya adalah menggantikan frasa yang lebih panjang dengan kata yang lebih singkat dan familiar, yaitu "**ASN**" (Aparatur Sipil Negara). Penggunaan kata "**ASN**" sudah diperkenalkan sebelumnya dalam teks, sehingga pembaca dapat dengan mudah mengaitkan bahwa yang dimaksud dengan "**ASN**" adalah "pegawai negeri sipil se NTB." Ini membuat kalimat tersebut lebih ringkas dan mudah dipahami.

### Konjungsi

Konjungsi adalah elemen penting dalam bahasa yang digunakan untuk menghubungkan kalimat atau frasa dalam sebuah teks. Dalam teks yang diberikan, kita dapat melihat beberapa penggunaan konjungsi yang sangat umum, seperti konjungsi koordinatif penyama pada beberapa data berikut ini:

"pegawai ASN **dan** keluarganya tidak melakukan kegiatan bepergian keluar daerah,"

“melakukan *rapid test antigen* **atau** *swab* H-1 sebelum berangkat **dan** setelah pulang dari perjalanan”

“pegawai ASN membatalkan melakukan perjalanan **dan** melakukan isolasi mandiri serta melaporkan kepemimpinan perangkat daerah masing-masing.

“menyampaikan *tagline* berlibur aman, nyaman, **dan** tanpa kerumunan dengan keluarga di rumah saja”

“media sosial masing-masing **dan** media sosial resmi perangkat daerah”

“Satuan Pamong Praja (Satpol PP) melakukan koordinasi **dan** pengawasan dengan aparat keamanan.”

Penggunaan konjungsi "**dan**" dan "**atau**" dalam teks ini membantu menjelaskan bahwa semua poin-poin ini adalah bagian dari serangkaian tindakan yang diperlukan untuk mencegah penularan COVID-19 selama masa libur panjang dan cuti bersama Maulid Nabi Muhammad SAW.

Selain itu terdapat juga konjungsi subordinatif temporal dan tujuan dalam teks yang dianalisis. Penggunaan konjungsi subordinatif temporal, seperti "**sebelum**" dan "**setelah**" membantu dalam menjelaskan tindakan yang harus diambil oleh pegawai ASN dalam situasi tertentu. Dalam kalimat ini, "Apabila ASN dalam keadaan terpaksa melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah, maka harus terlebih dahulu melakukan rapid test antigen atau swab H-1 sebelum berangkat dan setelah pulang dari perjalanan,". Konjungsi "**sebelum**" digunakan untuk menunjukkan tindakan yang harus dilakukan sebelum pergi, yaitu melakukan rapid test antigen atau swab H-1 sebelum berangkat. Ini adalah langkah pencegahan yang diperlukan untuk memastikan bahwa pegawai ASN tidak membawa COVID-19 saat melakukan perjalanan.

Selanjutnya, konjungsi "**setelah**" digunakan untuk merinci tindakan yang harus diambil setelah pegawai ASN kembali dari perjalanan, yaitu melakukan rapid test antigen atau swab. Ini adalah tindakan tambahan yang perlu dilakukan untuk memeriksa apakah pegawai ASN telah terpapar COVID-19 selama perjalanan mereka. Dengan demikian, konjungsi subordinatif temporal "sebelum" dan "setelah" membantu dalam menyusun langkah-langkah pencegahan dengan jelas dan teratur berdasarkan urutan waktu yang relevan.

Sementara konjungsi subordinatif tujuan, seperti penggunaan kata "**agar**" yang terdapat pada kalimat "sehubungan dengan hal tersebut dalam upaya pencegahan penularan covid-19, diminta kepada seluruh pegawai negeri sipil se NTB agar....". Dalam kalimat ini, konjungsi "**agar**" digunakan untuk mengekspresikan tujuan dari permintaan atau tindakan yang diambil. Tujuan dari permintaan ini adalah agar pegawai negeri sipil di NTB mengambil langkah-langkah tertentu dalam upaya mencegah penularan COVID-19, seperti mensosialisasikan protokol kesehatan kepada masyarakat atau tidak melakukan perjalanan keluar daerah.

Kemudian, kalimat "demikian agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya". Di sini, konjungsi "**agar**" digunakan untuk menyatakan tujuan dari tindakan atau instruksi sebelumnya. Tujuan dari semua tindakan yang disebutkan sebelumnya dalam teks adalah agar mereka dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ini berarti bahwa permintaan dan langkah-langkah yang telah dijelaskan sebelumnya dimaksudkan untuk memastikan bahwa upaya pencegahan penularan COVID-19 dapat dilakukan dengan seefektif dan sebaik-baiknya.

## **Makrostruktural**

Makrostruktural adalah pendekatan analisis dalam studi praktik sosial dan budaya yang berfokus pada pandangan bahwa konteks sosial di luar media memiliki pengaruh pada bagaimana wacana muncul dalam media. Praktik-praktik sosial dan budaya

termasuk unsur situasional, institusional, dan sosial, memengaruhi baik media itu sendiri maupun cara wacana diungkapkan melalui media tersebut. Tingkat situasional berkaitan dengan situasi peristiwa komunikasi (konteks situasi). Tingkat institusional berhubungan dengan pengaruh yang berasal dari institusi, baik yang ada di dalam maupun di luarnya. Tingkat sosial, sebaliknya, berfokus pada lingkup yang lebih besar, seperti sistem politik, ekonomi, dan budaya dalam masyarakat (Fairclough, 1995).

Pertama, praktik sosial dan budaya yang berhubungan dengan konteks situasional peristiwa komunikasi sehubungan dengan munculnya pandemi COVID-19 diidentifikasi melalui penggunaan istilah-istilah yang dapat ditemukan pada poin data (1) hingga (7).

1. Mensosialisasikan protokol penerapan protokol kesehatan untuk mencegah penularan covid 19 kepada masyarakat (menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan)
2. Pegawai ASN dan keluarganya tidak melakukan kegiatan bepergian keluar daerah
3. Apabila ASN dalam keadaan terpaksa melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah, maka harus terlebih dahulu melakukan rapid test antigen atau swab H-1 sebelum berangkat dan setelah pulang dari perjalanan
4. Bila hasil testnya dinyatakan reaktif atau positif covid-19, pegawai ASN membatalkan melakukan perjalanan dan melakukan isolasi mandiri serta melaporkan kepemimpinan perangkat daerah masing-masing
5. Menyampaikan tagline berlibur aman, nyaman, dan tanpa kerumunan dengan keluarga di rumah saja
6. Menyampaikan informasi positif dan benar (bukan hoax) kepada masyarakat tentang Covid-19 melalui media sosial masing-masing dan media sosial resmi perangkat daerah
7. Satuan Pamong Praja (Satpol PP) melakukan koordinasi dan pengawasan dengan aparat keamanan

Dari poin data (1) hingga (7) dalam surat edaran tersebut menggambarkan tentang praktik sosial dan budaya yang berkaitan dengan konteks situasi, misalnya poin data (1) menjelaskan bahwa sebelumnya masyarakat tidak biasa dengan aturan memakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan, tetapi munculnya covid ini memaksa dan merubah pola perilaku sosial untuk melindungi diri dari tertularnya penyakit. Kemudian poin data (2) juga menjelaskan pembatasan pergerakan ASN, keluarganya, dan seluruh masyarakat. Sebelumnya masyarakat bebas kemanapun mereka ingin pergi tanpa ada aturan yang mengatur. Namun munculnya COVID-19 menimbulkan norma baru baik dalam aktivitas organisasi pemerintah maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, aturan tersebut merupakan praktik sosial yang di adopsi dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Namun, aturan tersebut akan tetap berlaku apabila kondisi tersebut masih dalam konteks situasi COVID-19.

Selanjutnya, tingkat institusi yang berhubungan dengan pengaruh dari institusi, baik yang berasal dari internal maupun eksternal, sebagaimana ditemukan dalam surat edaran (SE) Gubernur NTB tentang Pencegahan Penularan COVID-19. Dalam SE ini, terdapat penunjukan terhadap pengaruh institusi lain, seperti insturksi Menteri Menkopolkam kepada gubernur untuk mengeluarkan SE tersebut. Selanjutnya, pada tingkat provinsi, gubernur memberikan instruksi kepada kepada pemangku kepentingan, termasuk ASN, Satpol PP, dan institusi keamanan lainnya untuk bersama-sama melaksanakan kebijakan yang termuat dalam SE tersebut.

Dari penjelasan yang telah digambarkan diatas, dapat dengan jelas diamati bagaimana interaksi dan pengaruh antara satu institusi terhadap institusi lainnya. Hal ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap proses produksi wacana dalam konteks yang dijelaskan. Pengaruh ini memegang peran sentral dalam menentukan bagaimana suatu wacana atau pesan dihasilkan, dipahami, dan disebarkan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, interaksi antara institusi dapat memengaruhi pemilihan isu-isu yang

dibahas, cara pesan disusun, serta naratif yang dihadirkan. Ini menggambarkan dinamika kompleks yang mungkin melibatkan negosiasi kepentingan, pertukaran informasi, serta pengambilan keputusan yang memengaruhi arah dan karakter dari wacana yang dihasilkan. Dengan kata lain, pengaruh antara institusi-institusi ini merupakan faktor kunci dalam pembentukan dan transformasi wacana yang pada gilirannya akan memengaruhi persepsi dan tanggapan masyarakat terhadap isu-isu yang relevan.

Terakhir, praktik sosial budaya yang berhubungan dengan tingkat sosial yang lebih makro, khususnya dalam bidang politik, terlihat bahwa dalam Surat Edaran (SE) terdapat penjelasan yang sangat eksplisit mengenai proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan yang diuraikan di dalamnya. Pada tingkat pusat, pemegang kendali dalam bidang keamanan adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam). Akibatnya, gubernur di tingkat provinsi dianggap sebagai ekstensi dari pemerintah pusat, yang wajib mematuhi serta melaksanakan seluruh kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Konteks ini menjadi jelas dalam SE tersebut, di mana gubernur mengeluarkan SE tentang COVID-19 sebagai hasil dari rapat virtual dengan Menkopolhukam. Gubernur berperan sebagai pemegang kekuasaan dan pembuat kebijakan di tingkat provinsi, serta meminta kerjasama seluruh jajaran dibawahnya, seperti Bupati, Walikota, ASN, dan lain-lain untuk turut serta dalam implementasi kebijakan tersebut.

### **Analisis Wacana Kritis**

Bagian ini dimaksudkan untuk menggali dan memahami peran sentral bahasa dalam proses mendukung atau menantang struktur kekuasaan sosial dan ideologi yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini, bahasa dianggap sebagai alat yang sangat kuat yang digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu, seperti elit politik, media massa, atau institusi-institusi sosial, untuk menjaga dan memperkuat kekuasaan serta mempromosikan ideologi mereka. Jadi, isi surat edaran (SE) tentang pencegahan penularan COVID-19 pada masa libur panjang menggunakan bahasa yang mendukung struktur kekuasaan sosial dan ideologi yang ditetapkan oleh pemerintah dalam upaya pencegahan penularan COVID-19. Ada beberapa aspek bahasa yang mendukung struktur kekuasaan sosial dan ideologi yang digunakan dalam SE tersebut.

**Pertama**, SE ini menggunakan bahasa yang mencerminkan otoritas dan kekuasaan pemerintah dalam mengambil tindakan terkait libur panjang dan cuti bersama. Pemakaian istilah kata "**Diminta**" dalam kalimat

"dalam upaya pencegahan penularan covid-19, diminta kepada seluruh pegawai negeri sipil se NTB"

dan kata "**Harus**" pada kalimat

"Apabila ASN dalam keadaan terpaksa melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah, maka harus terlebih dahulu melakukan rapid test antigen"

Kedua kata tersebut merupakan kata perintah yang tegas kepada pegawai negeri sipil. Hal ini mencerminkan struktur kekuasaan yang kuat dari pemerintah dalam mengatur perilaku pegawai negeri sipil, menunjukkan adanya kontrol yang ketat terhadap tindakan yang harus diambil dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Penggunaan bahasa ini juga menonjolkan keharusan patuh terhadap aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, menggambarkan sejauh mana kebijakan tersebut dianggap penting dan mengandung dampak signifikan bagi masyarakat.

**Kedua**, SE ini menggunakan bahasa instruksi dengan memberikan instruksi konkrit kepada pegawai ASN tentang tindakan yang harus diambil untuk mencegah penularan

COVID-19, seperti frasa “**penggunaan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan**” pada kalimat

“Mensosialisasikan protokol penerapan protokol kesehatan untuk mencegah penularan covid 19 kepada masyarakat (menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan)”

Dengan menggunakan bahasa instruksi yang konkret, SE ini memberikan panduan yang spesifik dan tegas mengenai tindakan preventif yang harus diambil, menunjukkan tekad pemerintah untuk mengontrol dan mengurangi risiko penularan COVID-19 di kalangan pegawai ASN serta masyarakat pada umumnya. Bahasa dalam surat edaran ini menekankan pentingnya menyampaikan informasi yang positif dan benar tentang COVID-19. Hal ini untuk mengatasi penyebaran informasi palsu atau hoaks yang dapat memicu kepanikan di masyarakat.

Ketiga, SE ini juga menggunakan bahasa yang menekankan pesan positif dan edukatif, seperti yang terdapat pada kalimat

“Menyampaikan *tagline* berlibur aman, nyaman, dan tanpa kerumunan dengan keluarga di rumah saja”

Pendekatan ini memiliki tujuan untuk merangsang perilaku yang aman dan bertanggung jawab selama liburan. Dengan menggunakan kata-kata seperti “**aman**”, “**nyaman**”, dan “**tanpa kerumunan**”, SE ini tidak hanya memberikan arahan, tetapi juga membentuk pesan yang bersifat mengedukasi, mengajak masyarakat untuk merenungkan dan mengapresiasi pentingnya menghabiskan waktu libur dengan memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan. Bahasa yang diadopsi mencerminkan kesadaran pemerintah akan pentingnya memotivasi perilaku positif, sehingga memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat dan upaya bersama dalam pencegahan penularan COVID-19. Dengan menonjolkan pesan positif, SE ini memberikan dorongan kepada individu untuk mengambil keputusan yang bijak dan menciptakan suasana liburan yang aman dan menyenangkan.

**Terakhir**, SE ini juga menyoroti peran Satuan Pamong Praja (Satpol PP) dalam melakukan koordinasi dan pengawasan, seperti yang terdapat pada kalimat,

“Satuan Pamong Praja (Satpol PP) melakukan koordinasi dan pengawasan dengan aparat keamanan”

Kalimat ini memperlihatkan betapa pemerintah memiliki perhatian yang serius terhadap pengelolaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan yang diatur dalam Surat Edaran. Dengan adanya kolaborasi antara Satpol PP dan aparat keamanan, pemerintah berusaha untuk memastikan bahwa pedoman-pedoman yang tercantum dalam Surat Edaran dijalankan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pernyataan ini mencerminkan tekad pemerintah untuk menciptakan sistem pengawasan yang kokoh dan berfungsi, menunjukkan bahwa mereka tidak hanya menyusun kebijakan, tetapi juga aktif terlibat dalam memastikan pelaksanaannya.

## Simpulan

Dalam penelitian ini, analisis wacana kritis terhadap Surat Edaran Gubernur NTB tentang pencegahan penularan COVID-19 selama masa libur panjang dan cuti Maulid Nabi Muhammad SAW pada tahun 2020 memberikan wawasan yang mendalam terhadap penggunaan bahasa sebagai alat kekuasaan dan pembentukan ideologi pemerintah. Pada tingkat mikrostruktural, analisis kohesi, seperti referen, substitusi, dan konjungsi, mengungkapkan bagaimana bahasa digunakan untuk membangun kohesi dan koherensi dalam teks. Pada tingkat makrostruktural, penelitian menggali keterkaitan antar institusi dan praktik sosial budaya, mengungkap dinamika kebijakan dan koordinasi dalam menangani krisis. Analisis wacana kritis pada tingkat sosial dan politik

menyoroti peran bahasa dalam membentuk pandangan publik dan mempertahankan struktur kekuasaan. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas bahasa dalam konteks pencegahan COVID-19, menegaskan bahwa bahasa bukan hanya sebagai medium informasi, melainkan juga sebagai alat kekuasaan dan pembentukan ideologi.

### Daftar Pustaka

- Badara, A. (2012). *Analisis wacana: teori, metode, dan penerapannya pada wacana media*. Jakarta : Kencana.
- Baryadi, I. P. (2002). *Dasar-dasar analisis wacana dalam ilmu bahasa*. Yogyakarta: Pustaka Gondho Suli.
- Brown, G., & Yule, G. (1983). *Discourse Analysis*. UK : Cambridge University Press.
- Coulthard, M. (1985). *An introduction to discourse analysis*. New York: Routledge.  
[https://doi.org/10.1016/0346-251x\(88\)90022-x](https://doi.org/10.1016/0346-251x(88)90022-x)
- Fairclough, N. (1995). Media discourse. In *Voprosy Kognitivnoy Lingvistiki*.  
<https://doi.org/10.20916/1812-3228-2018-1-12-16>
- Halliday, M. A. K., & Hasan, R. (1976). *Cohesion in English (book)-Longman Group Ltd. (1976).pdf* (hal. 11).
- Humaira, H. W. (2018). Analisis Wacana Kritis (Awk) Model Teun a. Van Dijk Pada Pemberitaan Surat Kabar Republika. *Jurnal Literasi*, 2 (1)(April), 32–40.
- Kridalaksana, H. (2008). *Kamus Linguistik (Fourth Edi)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rahimi, F., & Riasati, M. (2011). Critical discourse dnalysis: Scrutinizing ideologically-driven discourses. *International Journal of Humanities and Social ...*, 1(16), 107–112.  
[http://ijhssnet.com/journals/Vol\\_1\\_No\\_16\\_November\\_2011/13.pdf](http://ijhssnet.com/journals/Vol_1_No_16_November_2011/13.pdf)
- Sumarlam. (2003). *Teori dan praktik analisis wacana*. Surakarta: Pustaka Cakra.

<https://dompukab.go.id/surat-edaran-gubernur-ntb-pencegahan-penularan-covid-19-dimasa-cuti-bersama-maulid-nabi-muhammad-saw.html>.